



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
- BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 64**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis (Renstra). Ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai Renja.

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
2. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD
3. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi tahap penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
4. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember, berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah

tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

5. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah meliputi analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu,

Mengingat arti strategis Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut disusun dengan berpedoman pada landasan hukum, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan (revisi dari Kepmeneg PU no 11/KPTS/2000);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
6. Permen Dalam Negeri nomor 114 tahun 2019, tentang Standard Pelayanan Minimal;

7. Permen Dalam Negeri nomor 16 tahun 2009 tentang Standard Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
8. Permen Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 Tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pemadam Kabakaran Kabupaten Garut;
13. Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RENJA Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2019 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2021.

Adapun tujuan disusunnya RENJA Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RKT dan Rencana Aksi APBD Tahun Anggaran 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika naskah Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut 2021 disusun, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

- 4.1 Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas pemadam Kebakaran Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran

Rencana Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut meliputi sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada rencana strategis. Sasaran dalam rencana kinerja (Renja) disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan diantaranya dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen LAKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2020 pada sisi akuntabilitas keuangan, belanja daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut sebagai berikut :

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung	5.104.553.207	5.024.061.957	98.42
Belanja Langsung	5.018.584.929	4.974.038.454	99.11
Jumlah Total	10.123.138.136	9.998.100.411	98.76

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 9.998.100.411,- atau sebesar 98,76 %,- yang terdiri dari total anggaran belanja Rp. 10.123.138.136,-.

Dalam hal capaian kinerja sasaran program Tahun 2020 terhadap dokumen perencanaan yang ada yaitu Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2021 dan Rencana Strategik Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dapat diambil kesimpulan secara umum mengenai pencapaian sasaran program/kegiatan terhadap dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menunjukkan kinerja sasaran yang cukup baik

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam renja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Dalam jangka waktu yang pendek pengukuran meliputi masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (Outcome), sedangkan untuk mengukur kinerja dalam jangka waktu yang relatif panjang dalam renja ini tidak dilakukan pengukuran, karena memerlukan waktu yang relatif panjang.

Pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut tahun anggaran 2021 dengan capaian yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)

Kabupaten Garut

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2020	
		Kegiatan (output)		(Tahun 2018)	Target Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Urusan Otonomi Daerah									
1	Program Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran							
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	7 Bulan	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang mempunyai legalitas pajak tahunan dan pengurusan administrasi Balik Nama Kendaraan	28 unit	16 Unit Mobil	18 STNK Mobil dan Motor	18 STNK Mobil dan Motor	100%	17 STNK Mobil dan 2 STNK Motor		
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang disediakan	5 orang	2 Orang dan 15 Jenis Perlengkapan Kebersihan	5 Orang, 16 Jenis	5 Orang, 16 Jenis	100%	1 Ob dan 16 Jenis		

4	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	22 Buah	Komputer 3 Unit, Laptop 3 Unit, Printer 5 Unit	22 Buah	22 Buah	100%	3 Jenis 17 Unit		
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	42 jenis	45 Jenis	42 jenis	42 jenis	100%	45 Jenis		
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 jenis	-	6 jenis	6 jenis	100%	16 Jenis		
7	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Jenis	61 Bh Lampu, 100 M kabel, Stop Kontak 5 Bh	9 Jenis	9 Jenis	100%	9 Jenis		
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	5 Buah	Printer/Scanner 4 Bh, dan Laptop 7 Bh	5 Buah	5 Buah	100%	3 Jenis		
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	15 jenis	14 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	12 Jenis		
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2170 eksemplar	2170 eksemplar	2.170 eksemplar	2.170 eksemplar	100%	2.170 eksemplar		
11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minuman	980 Orang	1250 Orang	980 Orang	980 Orang	100%	1.520 Orang		
12	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	12 bulan	99 OH	89 OH	89 OH	100%	86 OH		
13	Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Jumlah Hasil Pekerjaan UPTD	3 UPT + 3 POS	-	3 UPT	3 UPT	100%	150 OH		

14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	12 bulan	-	100 OH	100 OH	100%	97 PH		
15	Penyediaan Jasa Iklan Media Cetak	Jumlah Media Iklan dan Cetak	16 Tayangan Iklan	24 Kali Tayangan	16 Tayangan Iklan	16 Tayangan Iklan	100%	22 Tayangan Iklan		
16	Pnyediaan Jasa Asuransi	Jumlah Kesjeahteraan Pegawai	38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	100%	78 Orang		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana								
1	Pengadaan Meubeuler	Jumlah Meubeuler yang tersedia	9 Jenis	-	9 Jenis	9 Jenis	100%	6 Jenis, 240 m2		
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Kantor yang dipelihara	5 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit Mobil Jabatan		
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	15 Unit Mobil dan 6 Unit Pompa Apung	14 Unit + 6 Pompa Apung	15 Unit Mobil dan 6 Unit Pompa Apung	15 Unit Mobil dan 6 Unit Pompa Apung	100%	17 Unit Pancar, 2 Mobil Operasioanal, 9 Ploting Pump		
4	Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah halaman gedung yang ditata	3 Lokasi	-	3 Lokasi	3 Lokasi	100%	80 M2		
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung yang layak						4 Unit		

6	Pnyediaan Air Baku	Jumlah Persediaan Air Baku	3 Bangunan	-	3 Bangunan	3 Bangunan	100%			
7	Pembuatan Sistem Informasi Pemadam Kebakaran Terpadu	Jumlah Masyarakat yang terlayani	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%			
8	Penyusunan UKL UPL Gedung Dinas Pemadam Kebakaran	tersedianya Dokumen hasil kajian Pengelolaan Lingkungan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	1 Dokumen		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur								
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu ansensi yang disediakan	4 Buah	-	4 Buah	4 Buah	100%			
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang disediakan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	60 stel	-	46 Orang	46 Orang	100%			
3	Pengadaan pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian batik yang disediakan	72 Orang	66 Orang	72 Orang	72 Orang	100%	116 Orang		
04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Peringatan Hari- hari Besar	Meningkatnya Kesadaran dan rasa korsa pegawai	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan		
2	Peningkatan SDM Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah SDM Yang kompeten Mengelola Manajemen perkantoran						4 Orang		

5	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Adanya Dokumen Perencanaan SKPD yang selaras dengan RPJMD, RPJMP dan disusun sesuai ketentuan								
1	Penyusun Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang selaras dengan RPJMD, RPJMP dan disusun sesuai ketentuan						6 Dokumen		
6	Program Pembangunan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pembangunan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-		
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah laporan capaian realisasi keuangan SKPD yang disusun sesuai ketentuan						10 Dokumen		
7	Program Peningkatan Pelayanan Non Kebakaran	Meningkatnya pelayanan non Kebakaran								
1	Kesiapsiagaan Operasi Peningkatan Pelayanan Non Kebakaran	Jumlah Pelayanan yang bisa di layanai	60 Penanganan Evakuasi	14 Jenis Alat rescue dan penanganan non Kebakaran 1 Tahun	60 Penanganan Evakuasi	60 Penanganan Evakuasi	100%			
8	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran								
1	Kegiatan Penyuluhan pencegahan bencana Kebakaran	Jumlah satgas pada Instansi pemerintah/swasta/pusat pelayanan publik yang dilatih	800 Orang	640 Orang	800 Orang	800 Orang	100%	350 Orang		

2	Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang siap siaga menangani kejadian kebakaran	72 Orang	70 Petugas Lapangan Pemadam	72 Orang	72 Orang	100%			
3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang tersedia	16 Jenis	2 Unit Mobil pK, 1 Unit Mobil Water Suply, 4 Macam Kelengkapan Pemadam, 5 Item Perengkapan Kerja Lapangan dan 14 HT, 3 Brithing Aparatus	16 Jenis	16 Jenis	100%	2 Unit Kendaraan Pemadam Kerbakaran dan 5 unit kendaraan roda dua		
4	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	100%			
5	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencagahan Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pencagahan Kebakaran	40 Gedung	40 Gedung	-	-	100%	50 Bangunan Gedung		
6	Penguatan Kapasitas Satuan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan Kebakaran yang terlatih dalam pencegahan baya kebakaran	160 Orang	440 Orang	160 Orang	160 Orang	100%	640 Orang		
7	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Kompetensi Pemadam Kebakaran	60 Orang	-	60 Orang	60 Orang	100%			
8	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi baik	19 Unit Mobil Operasional Pemadam Kebakaran, Mesin Portabel dan Ploting Pum	-	19 Unit Mobil Operasional Pemadam Kebakaran, Mesin Portabel dan Ploting Pum	19 Unit Mobil Operasional Pemadam Kebakaran, Mesin Portabel dan Ploting Pum	100%	15 Unit Pemadam Kebakaran, 7 Unit Ploting Pump, 2 Unit Portabel dan 2 Unit rekondisi		

9	Aplikasi Sistem Informasi Data Kejadian Kebakaran (SIDAKK)	Jumlah Informasi Data Kejadian Kebakaran	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%			
10	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (Lanjutan)	Jumlah Dokumen RISPK lanjutan yang tersedia						1 Dokumen		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pemadaman Kebakaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Pengaturan SPM Sub Urusan Kebakaran meliputi:

1. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
2. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
3. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
4. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran;
5. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;

3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran;
6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran

Dalam menentukan pencapaian pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Garut masih terkendala dikarenakan belum selesainya penyusunan Pedoman Teknis Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan dalam negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
3. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Damkar dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah organisasi yang

melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Damkar dan Penyelamatan.

6. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan Kebakaran.
7. Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas investigasi kejadian kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta perbengkelan sarana prasarana pemadam kebakaran.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk:

- a. Mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan melalui Perangkat Daerah Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- b. Merumuskan kelembagaan Dinas Damkar dan Penyelamatan yang memiliki standardisasi nomenklatur, fungsi dan struktur kelembagaan di provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Melakukan pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Dalam hal ini Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut adalah tidak adanya cangkolan bagi Pemadam kebakaran untuk bisa mengajukan anggaran ke pusat dan provinsi dikarenakan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 baru ditetapkan tahun 2020 sehingga belum terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tingkat Provinsi ataupun di Pusat.

Isu-isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut:

- Kurangnya Tempat Layanan atau POS Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sehingga beberapa kejadian terlambat di tangani,
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran,
- Kurangnya SDM Petugas Pemadam Kebakaran,
- Belum adanya koordinasi dengan instansi berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan

pasca kebakaran.

- Masih kurangnya peran serta dan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran.
- Belum adanya Peraturan Daerah Tentang Pemadam Kebakaran.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Program dan kegiatan prioritas terdiri dari 2 program, 11 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan pada rancangan awal RKPD, secara rinci disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisa si Capai an RKPD Tahun 2020	Praki raan Capai an Targe t RKPD Tahu n 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
					Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasion al	Daerah				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						17,909,654,531						24,079,209,321		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTAS E LAYANAN ADMINISTRA SI PERKANTOR AN	%		%	100 %	8,071,557,371						100 %	11,993,978,321	
Perencanaa n, Penggarga n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan penyelesaian perencanaan	%		%	100 %	50,000,000						100 %	76,560,000	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang selaras dengan RPJMD, RPJMP dan disusun sesuai ketentuan				30 dokumen	25,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		30 dokumen	33,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian realisasi keuangan SKPD yang disusun sesuai ketentuan				30 dokumen	25,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		30 dokumen	43,560,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji ASN di Dinas Pemadam Kebakaran	%		%	100 %	6,203,300,301						100 %	6,823,630,331	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN di Dinas Pemadam Kebakaran				14 Bulan	6,203,300,301	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Dinas Pemadam Kebakaran	14 Bulan	6,823,630,331	Dinas Pemadam Kebakaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%		%	100 %	239,983,080						100 %	3,435,514,780	

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	21,468,300	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN dinas Pemadam Kebakaran	2 Unit	22,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Keseragaman Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran				108 stell	218,514,780	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN dinas Pemadam Kebakaran	108 stell	308,514,780	Dinas Pemadam Kebakaran
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	tersedianya administrasi kepegawaian				14 bulan	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN dinas Pemadam Kebakaran	14 bulan	3,105,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah						317,000,000							323,700,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Perlengkapan Listrik dan Elektrikal yang dipergunakan				9 Jenis	10,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		9 Jenis	11,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai				34 Jenis	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		34 Jenis	100,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dengan Kondisi Baik				5 Jenis	15,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangguning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		5 Jenis	16,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang siap dipergunakan				5 Jenis	50,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangguning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		5 Jenis	50,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran Lokal dan Regional yang tersedia				142 Eksemplar	12,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangguning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		142 Eksemplar	13,200,000	Dinas Pemadam Kebakaran

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dan peserta rapat yang mendapatkan jamuan makan minum				1020 OH	30,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkata n pelayanan publik dan kinerja aparatur		1020 OH	33,000,000	Dinas Pemada m Kebaka ran
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi yang dihadiri				192 OH	100,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkata n pelayanan publik dan kinerja aparatur		192 OH	100,000,000	Dinas Pemada m Kebaka ran
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						539,909,640							473,000,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan				1 unit	404,909,640	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkata n pelayanan publik dan kinerja aparatur		1 unit	440,000,000	Dinas Pemada m Kebaka ran
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeulair				9 Jenis	135,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkata n pelayanan publik dan kinerja aparatur		9 Jenis	33,000,000	Dinas Pemada m Kebaka ran

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120,150,600							132,165,660	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	86,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangguning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		12 Bulan	94,600,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang mendapatkan perawatan/pemeliharaan				2 Jenis	10,087,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangguning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		2 Jenis	11,095,700	Dinas Pemadam Kebakaran
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan yang mendapatkan honorarium jasa kebersihan dan pembelian perlengkapan kebersihan				2 Jenis	24,063,600	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangguning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		2 Jenis	26,469,960	Dinas Pemadam Kebakaran

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						601,213,750						729,407,550		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK kendaraan Dinas yang diperpanjang legalitas/masa berlakunya				21 STNK	76,890,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		21 STNK	84,579,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang diperpanjang legalitas/masa berlakunya				18 STNK	524,323,750	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		18 STNK	494,828,550	Dinas Pemadam Kebakaran
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan dengan kondisi baik				4 bangunan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		4 bangunan	150,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	%		%	100 %	9,838,097,160						100 %	12,085,231,000	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Sarana Prasarana dan Penanggulangan Kebakaran	%		%	100 %	8,838,097,160						100 %	11,028,231,000	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RISPK (Master Plan) yang tersedia				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran, lembaga Pemerintah swasta, masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang siap siaga menangani kejadian kebakaran				156 Orang	3,855,800,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangguning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran, lembaga Pemerintah swasta, masyarakat	156 Orang	4,945,375,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dalam kondisi siap pakai				3 Jenis	400,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangguning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran, lembaga Pemerintah swasta, masyarakat	3 Jenis	450,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Kendaraan Pemadam Kebakaran yang baru				2 Unit	4,162,297,160	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangguning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran, lembaga Pemerintah swasta, masyarakat	2 Unit	5,212,856,000	Dinas Pemadam Kebakaran
	Jumlah Peralatan dan Sarana Penunjang	17 Jenis												
	Pembangunan Gedung Kantor	2 Kegiatan												

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Kompetensi/sertifikat Pemadam Kebakaran				24 Orang	220,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran, lembaga Pemerintah swasta, masyarakat	24 Orang	220,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	terselenggaranya peringatan HUT damkar tingkat Nasional, Provinsi dan kabupaten				1 Kegiatan	100,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran, lembaga Pemerintah swasta, masyarakat	1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	bangunan		bangunan	50 bangunan	100,000,000						50 bangunan	100,000,000	

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang di periksa alat proteksi kebakaran				50 Unit Gedung Bangunan	100,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Bangunan Gedung Pemerintah, perusahaan, swasta, dan pelayanan publik lainnya	50 Unit Gedung Bangunan	100,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang di periksa alat proteksi kebakaran				50 Unit Gedung Bangunan	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Bangunan Gedung Pemerintah, perusahaan, swasta, dan pelayanan publik lainnya	50 Unit Gedung Bangunan	0	Dinas Pemadam Kebakaran
Investigasi Kejadian Kebakaran	Tersedianya Investigator Kebaraan pada Dinas Pemadam Kebakaran	%		%	100 %	100,000,000						100 %	87,000,000	
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigator Pemadam Kebakaran				2 Orang	100,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	ASN Dinas Pemadam Kebakaran	2 Orang	87,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	%		%	100 %	600,000,000						100 %	600,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Relawan yang terlatih dalam pencegahan dini kebakaran				800 Orang	300,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangguning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	asyarakat Kabupaten Garut	800 Orang	300,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan yang terlatih dalam pencegahan dini kebakaran				800 Orang	300,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangguning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	asyarakat Kabupaten Garut	800 Orang	300,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibagikan kepada Relawan Pemadam Kebakaran				1 Jenis	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangguning			7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	asyarakat Kabupaten Garut	1 Jenis	0	Dinas Pemadam Kebakaran

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	%		%	100 %	200,000,000						100 %	270,000,000	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang melaksanakan pelatihan Vertical Rescue				3000 per orang	50,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Masyarakat	3000 per orang	100,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Peralatan sesuai standar rescue				1 Jenis	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Masyarakat	1 Jenis	0	Dinas Pemadam Kebakaran

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Peralatan sesuai standar rescue				2 Jenis	50,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Masyarakat	2 Jenis	50,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Petugas Penyelamat (Rescue) : Vertical Rescue, Water Rescue, Animal rescue				40 Orang	100,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggu ng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Masyarakat	40 Orang	120,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
						17,909,654,531							24,079,209,321	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Setiap usulan dan aspirasi dari masyarakat melalui forum Gabungan SKPD dan Musrenbang selalu diakomodir disesuaikan dengan program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang tersedia. Apabila terdapat usulan yang belum terakomodir diusulkan pada tingkat Provinsi.

Untuk hasil musrenbang, belum adanya usulan yang masuk dari masyarakat untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menjalankan tugasnya petugas pemadam kebakaran wajib siaga 24 jam yang tidak mengenal hari libur dan siap memadamkan kebakaran dan Penyelamatan dengan motto **“Pantang Pulang Sebelum Api Padam Walau Nyawa Taruhannya”**. Sosok petugas pemadam kebakaran bekerja dengan siap siaga hadir dalam penyelamatan jiwa, melakukan tugas dengan ikhlas tanpa pamrih, tanpa mengharap pujian dan sanjungan, memberi pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Memadamkan api besar dan penyelamatan tidaklah semua orang bisa melakukannya hanya petugas pemadam kebakaranlah yang mempunyai profesi dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan, untuk itu dituntut seorang petugas pemadam kebakaran melakukan pendidikan dan pelatihan untuk memiliki profesionalitas. Selain itu tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran dikenal dengan Panca Darma yaitu:

1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
2. Pemadaman Kebakaran;
3. Penyelamatan;
4. Pemberdayaan Masyarakat;
5. Penanganan Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun.

Kebakaran adalah hal yang ditakuti yang dapat menghanguskan kebutuhan dasar masyarakat yaitu pangan, sandang, dan papan. Sumber daya disekitar masyarakat selalu ada ancaman dari kebakaran yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi, kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Untuk itu perlu mereposisi sudut pandang kita dalam penanggulangan kebakaran yang kita hadapi, serta arah kebijakan ke depan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya perlindungan dari ancaman serta dampak dari bencana dan kebakaran yang dapat menambah angka Kemiskinan.

Secara geografis Indonesia berada pada *ring of fire*. berada pada pertemuan tiga lempeng dunia yang menjadi faktor pemicu rawan terjadinya bencana, disamping itu sumber kerawanan lain berupa heterogenitas bangsa Indonesia yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik yang berdampak luas bagi keamanan dan ketenteraman rakyat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai laboratorium bencana, berbagai bencana dapat dijumpai meliputi bencana alam, non alam, maupun sosial. Bencana alam yang sering terjadi antara lain gunung meletus, tsunami, angin puting beliung, dan banjir bandang. Karakter dasar dari bencana alam ini adalah tidak dapat dilawan dan distop namun dapat dihindari dengan melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Sedangkan kebakaran dapat distop, dicegah atau di hentikan karena penyebab kebakaran 99 % akibat ulah manusia baik disengaja maupun tidak disengaja dan sebagian kecil penyebab kebakaran akibat bencana alam yang disusul timbulnya kebakaran.

Kejadian kebakaran khususnya kebakaran lahan gambut yang tidak dilakukan pemadaman dini, dapat mengakibatkan bencana pencemaran asap sampai ke negara tetangga yang mengganggu mutu udara yang berakibat terganggunya jarak pandang dan transportasi, kesehatan masyarakat pada pernapasan sehingga aktivitas kehidupan masyarakat yang berdampak terhadap kemunduruan ekonomi dan kerusakan lingkungan yang luar biasa, sehingga dibutuhkan *cost recovery* yang sangat besar. Sebagaimana yang di alami Indonesia tahun 2015 hampir seluruh provinsi dikepung pencemaran asap, mengakibatkan lebih dari sebulan kita dirundung darurat kabut asap akibat kebakaran lahan gambut yang sebagian besar terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bahkan sebagian di Sumatera Utara, Pulau Jawa, Sulawesi Tenggara, dan Papua yang menghanguskan ratusan ribu hektar, mengakibatkan buruknya mutu udara yang berdampak terhadap terganggunya transportasi, pernapasan masyarakat, pendidikan dan terganggunya perekonomian dengan kerugian diperkirakan kurang lebih sebesar 50 triliun rupiah.

Kebijakan kebakaran dan bencana dalam urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kebakaran merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub urusan kebakaran menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, Provinsi Dan Kabupaten/Kota, namun di dalam matrik pembagian kewenangan, penanggung jawab utama adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota, oleh karena itu sub urusan kebakaran menjadi strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran pemerintah daerah sebagai perwujudan menjamin kehadiran pemerintah daerah didalam melayani penderitaan rakyat akibat bencana dan kebakaran, hal ini sebagai perwujudan yang sejalan dengan Nawa Cita atau agenda Presiden Republik Indonesia 2014-2019 pada point pertama menyatakan "menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara". Sub urusan bencana dan kebakaran dalam pasal 72 huruf e dan lampirannya undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kewenangan dan tanggungjawab daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 8 dan pasal 9 undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kedua Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah. menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran. Oleh karena itulah dituntut daerah membentuk lembaga yang membidangi sub urusan bencana dan kebakaran.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut memperhatikan tantangan perkembangan pembangunan nasional, regional maupun global, karena itu penyusunannya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten. Dalam menyusun program dan kegiatan, Dinas Pemadam Kabupaten Garut tentu tidak terlepas tugas pokok dan fungsi pendam kebakaran seperti yang telah dijelaskan di atas.

Prediksi kedepan Kondisi Kabupaten Garut sebagai kota yang mulai berkembang akan semakin padat bangunan dan gedung yang mengarah pada bangunan vertikal serta semakin padat penduduk, berdasarkan hal tersebut perlindungan kepada masyarakat, aman dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pencegahan dan penanggulangan yang handal merupakan suatu yang esensial untuk di wujudkan.

Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud diperlukan suatu komitmen yang terintegrasi dari stakeholder, secara bertahap dan

berkesinambungan dilaksanakan sebagaimana RPJMD dan RPJPD dengan menggali dan memanfaatkan peluang dari berbagai sumber anggaran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran

Untuk mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Garut, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki tujuan dan sasaran dalam menentukan tujuan dan sasaran kebijakan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun yang dirumuskan secara teknokrat dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Garut. Adapun tujuan dari Renja Dinas Pemadam Kebakaran 2021 adalah :

1. Peningkatan Cakupan Wilayah manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS Damkar).

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran dari Renja Dinas Pemadam Kebakaran 2021 adalah :

1. Meningkatnya layanan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan rancangan awal pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut dapat dilihat pada table 3.1

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					17,909,654, 531			24,079,2 09,321					
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8,071,557,3 71			11,993,9 78,321					
1	5	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					50,000,000			76,560,0 00					
1	5	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PERSENTAS E LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang selaras dengan RPJMD, RPJMP dan disusun sesuai ketentuan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpan ggung	100 %	30 doku men		25,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	33,000,0 00

1	5	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Laporan capaianan realisasi keuangan SKPD yang disusun sesuai Ketentuan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	30 dokumen		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	43,560,000
1	5	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6,203,300,301				6,823,630,331	
1	5	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah ASN di Dinas Pemadam Kebakaran	terpenuhinya Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan Dinas Pemadam kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	14 Bulan	14 bulan	6,203,300,301	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	6,823,630,331
1	5	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							239,983,080				3,435,514,780	

1	5	1	2.1	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan SDM aparatur yang profesional	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	2 Unit	3 item	21,468,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	22,000,000
1	5	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Keseragaman Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran	Peningkatan SDM aparatur yang profesional	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	108 stel	3 item	218,514,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	308,514,780
1	5	1	2.1	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	tersedianya administrasi kepegawaian	Peningkatan SDM aparatur yang profesional	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	14 bulan	3 item	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTASE LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	3,105,000,000
1	5	1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah									317,000,000				323,700,000
1	5	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Perlengkapan Listrik dan Elektrikal yang dipergunakan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung			9 Jenis	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			11,000,000
1	5	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			34 Jenis	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000

1	5	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dengan Kondisi Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpan ggung	5 Jenis	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	16,500,000
1	5	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang siap dipergunakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpan ggung	5 Jenis	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50,000,000
1	5	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran Lokal dan Regional yang tersedia	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpan ggung	142 Eksemplar	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13,200,000
1	5	1	2.1	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu dan peserta rapat yang mendapatkan jamuan makan minum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpan ggung	1020 OH	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33,000,000
1	5	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi yang dihadiri	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpan ggung	192 OH	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100,000,000
1	5	1	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					539,909,640		473,000,000

1	5	1	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpan ggung		1 unit		404,909,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				440,000,000
1	5	1	2.1	5	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebeulair		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpan ggung		9 Jenis		135,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33,000,000
1	5	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							120,150,600				132,165,660		
1	5	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya Tagihan Telepon, Internet, Air dan Listrik		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpan ggung		12 Bulan		86,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				94,600,000
1	5	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan Kerja yang mendapatkan perawatan/pemeliharaan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpan ggung		2 Jenis		10,087,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,095,700
1	5	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Petugas Kebersihan yang mendapatkan honorarium jasa kebersihan dan pembelian perlengkapan kebersihan		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpan ggung		2 Jenis		24,063,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,469,960
1	5	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							601,213,750				729,407,550		

1	5	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK kendaraan Dinas yang diperpanjang legalitas/masa berlakunya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung		21 STNK		76,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			84,579,000
1	5	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang diperpanjang legalitas/masa berlakunya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung		18 STNK		524,323,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			494,828,550
1	5	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan dengan kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 bangunan		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						9,838,097,160				12,085,231,000
1	5	4	2		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						8,838,097,160				11,028,231,000

1	5	4	2	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Jumlah Dokumen RISPK (Master Plan) yang tersedia	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Dokumen	7 item	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	100 %	100,000,000
1	5	4	2	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang siap siaga menangani kejadian kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	156 Orang	7 item	3,855,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	100 %	4,945,375,000
1	5	4	2	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dalam kondisi siap pakai	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	3 Jenis	7 item	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	100 %	450,000,000

1	5	4	2	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Jumlah Kendaraan Pemadam Kebakaran yang baru	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	2 Unit	7 item	4,162,297,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	100 %	5,212,856,000
											17 Jenis						
											2 Kegiatan						
1	5	4	2	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran Yang Memiliki Kompetensi/sertifikat Pemadam Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	24 Orang	7 item	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	100 %	220,000,000

1	5	4	2	9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	terselenggaranya peringatan HUT damkar tingkat Nasional, Provinsi dan kabupaten	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Kegiatan	7 item	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	100 %	100,000,000
1	5	4	2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							100,000,000				100,000,000	
1	5	4	2	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang memiliki Pos Pemadam Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang di periksa alat proteksi kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran pada bangunan gedung	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	68 %	50 Unit Gedung Bangunan	50 bangunan gedung	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang memiliki Pos Pemadam Kebakaran	68 %	100,000,000

1	5	4	2	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang memiliki Pos Pemadam Kebakaran	Jumlah bangunan gedung yang di periksa alat proteksi kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran pada bangunan gedung	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	68 %	50 Unit Gedung Bangunan	50 bangunan gedung	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang memiliki Pos Pemadam Kebakaran	68 %	0
1	5	4	2		Investigasi Kejadian Kebakaran							100,000,000				87,000,000	
1	5	4	2	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Jumlah Investigator Pemadam Kebakaran	Jumlah Investigator Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	2 Orang	2 orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	100 %	87,000,000
1	5	4	2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							600,000,000				600,000,000	
1	5	4	2	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Jumlah Relawan yang terlatih dalam pencegahan dini kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	800 Orang	800 orang	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	100 %	300,000,000

1	5	4	2	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Jumlah Relawan yang terlatih dalam pencegahan dini kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	800 Orang	800 orang	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	100 %	300,000,000
1	5	4	2	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibagikan kepada Relawan Pemadam Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	1 Jenis	800 orang	0		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	100 %	0
1	5	4	2		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia							200,000,000				270,000,000	
1	5	4	2.1	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Menganca	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang melaksanakan pelatihan Vertical Rescue	Jumlah penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	3000 per orang	3000 orang	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	100 %	100,000,000

					Evakuasi														
											TOTAL	17,909,654, 531						24,079,2 09,321	

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2022 juga merupakan tahun berjalan dalam RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian akan menjadi fokus pencapaian target pada Renstra SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Dengan demikian Rencana Kerja tahun 2022 harus fokus terhadap target-target pada program dan kegiatan yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut merupakan tanggungjawab bersama, secara struktural satu sama lain saling terkait sehingga dalam pelaksanaannya harus terpadu dan terjalin koordinasi yang baik.

Sebagaimana diketahui Tugas Pemadam Kebakaran secara logis akan terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan. Berkenaan hal tersebut dituntut kesungguhan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan.

Sikap terbuka, toleran dan kesediaan untuk kerjasama secara positif dan kreatif akan menambah keberhasilan program. Sehingga apa yang menjadi harapan organisasi terhadap keberhasilan program dan kegiatan dimaksud dapat mengantarkan terwujudnya visi dan misi Kabupaten Garut.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh jajaran pejabat struktural Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban

- untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan rencana kerja secara sinergis dan terintegrasi.
2. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Garut Tahun 2022.
 3. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2022.
 4. Dalam rangka menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap pejabat struktural wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkan secara berkala triwulan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut melalui Sekretaris.
 5. Rencana kerja tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir tahun 2022. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN